

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020

Miftahuddin*, Ahmad Yunani

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

* udinm94@gmail.com

Abstract.

This study aims to determine the classification of government financial performance and the effect of economic growth and the number of taxpayers on the government's financial performance of the Banjar Regency Government in 2015-2020. The analytical method analyzes local government financial performance and multiple linear regression. The results showed that the classification of the financial performance of the Banjar Regency government in 2015-2020, on average, was in the medium category. In multiple linear regression analysis, it is known that economic growth and the number of taxpayers affect the financial performance of the Banjar Regency government. This shows that there needs to be an effort by the government to improve financial performance by taking policies that can improve the financial performance of local governments locally.

Keywords: *Government Financial Performance; economic growth; Number of Taxpayers*

Abstrak.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui klasifikasi kinerja keuangan pemerintah serta pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2020 rata-rata berada pada klasifikasi sedang. Pada analisis regresi linear berganda diketahui bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja keuangan dengan mengambil kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; Jumlah Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Otonomi daerah ada dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan undang-undang tersebut otonomi daerah adalah hak daerah otonom, wewenang daerah otonom, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah yaitu supaya pembangunan merata, tidak terjadi ketimpangan antara perintah pusat dan pemerintah daerah dengan begitu masyarakat akan lebih sejahtera. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah di daerah juga termasuk dalam hal menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, hal ini memepertegas agar keuangan daerah dikelola dengan baik dan benar. Untuk melihat seberapa baik dan benar keuangan daerah dikelola, maka diperlukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan daerah ini memiliki dua tujuan yaitu pertama untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan kedua

yaitu untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset daerah (Jumingan, 2017).

Tabel 1
Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020

Tahun	Pendapatan Daerah		Capaian (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2015	1.553.787.524.561	1.502.410.703.286	96,69
2016	1.780.673.625.379	1.711.541.447.620	96,12
2017	1.655.514.444.288	1.629.599.468.617	98,43
2018	1.663.325.926.645	1.754.215.067.740	105,46
2019	1.951.406.673.189	1.842.344.018.623	94,41
2020	1.742.683.147.171	1.464.772.647.982	84,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (diolah), 2021

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar masih dikatakan kurang. Hal ini bisa dilihat dalam capaian dari pendapatan Kabupaten Banjar rata-rata masih berada dibawah 100% dari target yang ditetapkan. Tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian dari kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar tersebut.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) bagaimana klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2015-2020? (2) Apakah pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) untuk mengetahui bagaimana klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar yang diukur dengan rasio kemampuan keuangan daerah (2) mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Jaya (1995) dalam Pangalila (2014) keuangan daerah adalah semua tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran pemerintah daerah yang meliputi pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah daerah (PEMDA) yang mencakup semua pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran dari pemerintah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam rentang waktu satu tahun serta dinyatakan dalam satuan uang (Badrudin, 2012). Sedangkan menurut Saragih (2003) APBD adalah suatu gambaran maupun tolak ukur penting keberhasilan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerahnya. Sehingga apabila dalam suatu perekonomian daerah mengalami peningkatan atau pertumbuhan, maka akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Sedangkan jika rendahnya angka PAD dapat menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja yaitu suatu gambaran pencapaian dari pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006). Sistem pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu sistem dengan tujuan membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Indikator dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan dilakukan analisis rasio keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2012). Salah satu rasionya yaitu kemampuan keuangan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2004) penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan yang sebenarnya mempunyai pengertian bahwa perkembangan diskala produksi dari barang dan jasa yang berlaku disuatu wilayah, contohnya seperti bertambahnya produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, bertambahnya sekolah, bertambahnya produksi sektor jasa dan bertambahnya barang modal.

Jumlah Wajib Pajak

Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi bahwa wajib pajak merupakan orang secara pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan pajak daerah. Sehingga jumlah wajib pajak merupakan jumlah dari orang secara pribadi atau secara badan yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah yang dilakukan oleh Nurhayati & Hamzah (2020) menunjukkan adanya pengaruh secara simultan dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian Azhari et al., (2020) dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tidak ada pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Sularso & Restianto (2011) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara derajat desentralisasi dengan alokasi belanja modal. Sedangkan ada pengaruh yang positif antara alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dimana pengalokasian belanja modal di pengaruhi oleh kinerja keuangan lebih khusus pada rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Sehingga dapat diketahui yaitu secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah kinerja keuangan daerah.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang diambil adalah membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian menentukan klasifikasi dari kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2015-2020.

Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan pengukuran kuantitas seperti jumlah dan angka dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis dimana sebagai subjek adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, sedangkan sebagai objek adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertumbuhan ekonomi serta jumlah wajib pajak.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat perkembangan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar. Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kemampuan keuangan daerah. Dengan rasio kemampuan daerah akan menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah Kabupaten Banjar dalam membiayai sendiri pemerintahannya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten adalah perkembangan perekonomian di Kabupaten Banjar, seperti perkembangan fiskal produksi dari barang dan jasa dalam di Kabupaten Banjar.

Jumlah Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak kabupaten adalah jumlah dari orang secara pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Kabupaten Banjar.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dan data jumlah wajib pajak Kabupaten Banjar yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi kinerja keuangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Berikut rumus perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah :

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{PUD} - \text{Belanja Pegawai ASN}$$

Tabel 2

Kemampuan Keuangan Daerah	Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah	
	Kabupaten/Kota Tahun 2007-2016	Kabupaten/Kota Tahun 2017-Sekarang
Tinggi	> Rp 400 Milyar	> Rp 550 Milyar
Sedang	Rp 200 Milyar – Rp 400 Milyar	Rp 300 Milyar -Rp 550 Milyar
Rendah	< Rp 200 Milyar	< Rp 300 Milyar

Sumber : Permendagri No. 21 Tahun 2007 dan Permendagri No. 62 Tahun 2017

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui hubungan pengaruh variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan alat bantu SPSS versi 16.0 for windows, dengan model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 PE_t + \beta_2 WP_t + \varepsilon_t$$

Keterangan :

- Y_t = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rp)
 α = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien Regresi
 PE_t = Pertumbuhan Ekonomi (%)
 WP_t = Jumlah Wajib Pajak (wajib pajak)
 ε = *Error Term*

HASIL DAN ANALISIS

Hasil Dan Analisis Klasifikasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 maka dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banjar rata-rata berada pada kisaran Rp 300 Miliar – Rp 550 Miliar. Kemampuan keuangan daerah tertinggi terjadi ditahun 2019 dengan nilai Rp 573.948.298.299, sedangkan kemampuan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp 288.099.415.072.

Tabel 3
Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah
2015	Rp 366.454.538.458	Sedang
2016	Rp 407.239.842.515	Tinggi
2017	Rp 355.307.807.982	Sedang
2018	Rp 482.271.457.462	Sedang
2019	Rp 573.984.298.299	Tinggi
2020	Rp 288.099.415.072	Rendah

Sumber : Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas maka kinerja keuangan daerah dapat kita klasifikasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dimana kemampuan keuangan daerah tahun 2015 dan 2017 merujuk pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2017 dan kemampuan keuangan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 merujuk pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2017. Pada tahun 2015, 2017 dan 2018 kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten banjar termasuk dalam kalsifikasi sedang. Pada tahun 2016 dan tahun 2019 klasifikasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten Banjar masuk dalam klasifikasi tinggi, sedangkan pada tahun 2020 kabupaten Banjar memiliki klasifikasi kinerja keuangan yang rendah. Sehingga rata-rata kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan kriteria kemampuan keuangan daerah dalam enam tahun terakhir ini masuk dalam klasifikasi sedang.

Hasil dan Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,615E9	6,776E10		0,112	0,918
X1_PE	3,252E10	5,864E9	0,865	5,546	0,012
X2_WP	6,495E7	1,271E7	0,797	5,109	0,015

Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dalam tabel 4 diatas maka persamaan regresi yaitu :

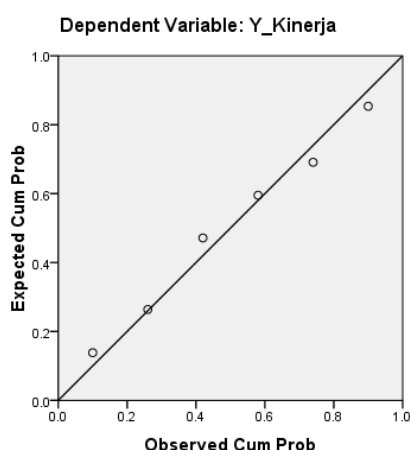
$$Y_t = 7,615E9 + 3,252E10PE_t + 6,495E7WP_t + \varepsilon_t$$

Sehingga dapat diketahui bahwa konstanta memiliki nilai 7,615E9, koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai 3,252E10, dan koefisien dari variabel jumlah wajib pajak memiliki nilai 6,495E7.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Output SPSS (diolah), 2021

Gambar 1

Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan gambar dari grafik Normal P-P Plot dari data model regresi tersebut dapat dilihat bahwa pola titik-titik mendekati dan mengikuti garis normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_PE	0,894	1,119
X2_WP	0,894	1,119

Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Pada variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan variabel jumlah wajib pajak (X2) memiliki angka tolerance sebesar 0,894 dan angka VIF sebesar 1,119. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi ini.

Uji Autokorelasi

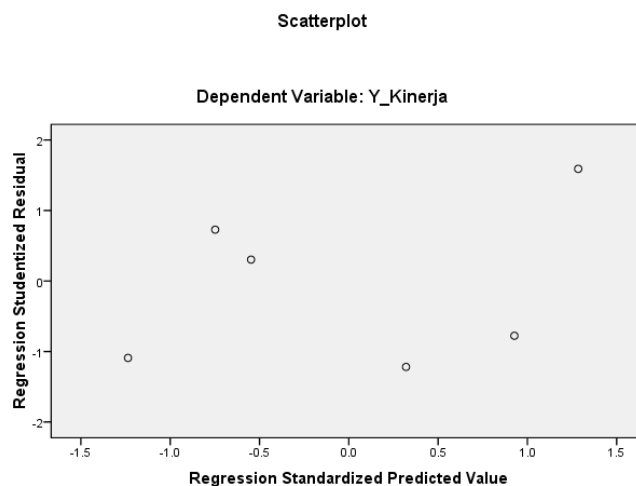
Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	3,218

Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan nilai *durbin watson* sebesar 3,218. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai tersebut kurang dari 4.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021

Gambar 2
Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar grafik scatterplot tersebut dapat dilihat bahwa pola titik-titik tersebar acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diketahui bahwa model regresi ini baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Hipotesisi

Uji Koefisien Korelasi

Tabel 7
Hasil Uji R dan R²

Model	R	R Square
1	0,967	0,935

Sumber : Output SPSS (Diolah), 2021

Jika dilihat pada tabel 7 diatas diatas nilai R menunjukkan angka 0,967 = mendekati 1. Maka berdasarkan nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel 7 diatas diperoleh nilai *R square* atau determinasinya adalah 0,935 = 93,5% hal ini mengartikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak secara bersamaan dapat menerangkan variabel kinerja keuangan daerah sebesar 93,5% dan sisanya diterangkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian sebesar 6,5%.

Hasil Uji Signifikan Simultan

Tabel 8
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1	21474	0,017
Regression		
Residual		
Total		

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2021

Pada tabel 8 diperoleh nilai signifikansi 1,7% < 5% ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga secara simultan apabila pertumbuhan ekonomi ditambah jumlah wajib pajak ditambah konstanta maka akan mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Signifikan Parameter Individual

Berdasarkan tabel 4 hasil dari pengujian menunjukkan pada variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai signifikansi $1,2\% < 5\%$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada variabel jumlah wajib pajak memperoleh nilai signifikansi $1,5\% < 5\%$ sehingga H_0 ditolak. Ini menunjukkan variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sehingga berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien pertumbuhan ekonomi adalah $3,252E10$ dapat diartikan jika variabel pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar satu persen, sementara variabel jumlah wajib pajak dianggap tetap, maka menyebabkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah sebesar Rp 3.252 Miliar dan diperoleh keterangan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan tingkat signifikan sebesar $1,2\% < 5\%$. Ini menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar maka juga akan semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan dalam jumlah wajib pajak menunjukkan nilai koefisien jumlah wajib pajak adalah $6,495E7$ yang mengartikan bahwa jika variabel jumlah wajib pajak mengalami kenaikan satu wajib pajak, sementara pertumbuhan ekonomi dianggap tetap, maka akan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar Rp 64,95 Miliar dan diperoleh keterangan bahwa variabel jumlah wajib pajak Kabupaten Banjar berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan nilai signifikan $1,5\% < 5\%$. Ini menjelaskan semakin tinggi jumlah wajib pajak maka akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Sehingga jumlah wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banjar.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian dinyatakan bawa klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar rata-rata berada pada klasifikasi sedang, dengan kata lain bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banjar masih perlu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar agar klasifikasi kinerja keuangan pemerintah masuk dalam kategori tinggi. Jika kita lihat pada pendapatan asli daerah sebagai salah satu faktor yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 9
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Pajak
2015	Rp 50,727,941,193
2016	Rp 62,166,292,235
2017	Rp 66,632,347,971
2018	Rp 72,022,015,100
2019	Rp 80,831,859,619
2020	Rp 76,877,296,725

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (Diolah), 2021

Pada tabel 9 diatas dapat diketahui perkembangan dari realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjar rata-rata terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini tentunya perlu di perhatikan pemerintah bagaimana langkah agar pendapatan pajak daerah terus meningkat. Dengan begitu apabila pajak dan retribusi meningkat yang menyebabkan peningkatan

pendapatan asli daerah sehingga klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria kemampuan keuangan daerah akan meningkat.

Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah. Apabila pertumbuhan ekonomi maupun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan maka akan berdampak baik pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar.

Jumlah wajib pajak di Kabupaten Banjar cenderung berfluktuasi dimana setiap tahunnya dari tahun 2015-2020 tidak selalu meningkat tetapi terdapat penurunan di beberapa tahun seperti pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wajib pajak sebesar 536 wajib pajak dari tahun 2019 sebanyak 5.913 wajib pajak menjadi 5.377 wajib pajak tahun 2020. Pada pertumbuhan di Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2020 sangat berfluktuasi tetapi lebih mengarah kepada penurunan pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat pada tahun 2018 ke 2019 pertumbuhan ekonomi turun dari 5,01% menjadi 4,52% kemudian pada tahun 2020 turun drastis menjadi -1,96%.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah kabupaten Banjar perlu melakukan kebijakan-kebijakan bagaimana agar meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar agar kinerja keuangan pemerintah dapat masuk dalam klasifikasi tinggi. Tentunya pemerintah Kabupaten Banjar perlu mengambil kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar.

Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan peningkatan potensi ekonomi yang menjadi unggulan di Kabupaten Banjar, dimana wilayah yang memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dikembangkan lagi dengan melakukan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus. Untuk meningkatkan Jumlah wajib pajak di Kabupaten Banjar pemerintah Kabupaten Banjar dapat mengambil kebijakan agar wajib pajak yang sudah terdaftar memiliki kemudahan akses dalam membayar pajak. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pendataan bagi badan atau orang yang memenuhi kewajiban pajak agar mendaftarkan badan atau dirinya menjadi wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang pertama adalah dalam menentukan klasifikasi keuangan Kabupaten Banjar menggunakan dua aturan permendagri. Dan yang kedua adalah penelitian menguji dua variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Banjar.

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan analisis rasio kemampuan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil klasifikasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2015, 2017 dan 2018 diklasifikasi sedang, pada tahun 2016 dan 2019 diklasifikasi tinggi, sedangkan tahun 2020 masuk dalam klasifikasi rendah. Pengaruh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar maupun jumlah wajib pajak di Kabupaten Banjar terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar, dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi di kabupaten Banjar dan variabel jumlah wajib pajak di Kabupaten Banjar berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banjar.

Saran

Pemerintah Kabupaten Banjar harus mengoptimalkan peningkatan kinerja keuangan agar klasifikasi kinerja keuangan pemerintah dapat dikatakan tinggi perlu adanya upaya yang mampu meningkatkan faktor-faktor yang memang mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah seperti jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar pemerintah perlu melakukan peningkatan pada potensi ekonomi yang menjadi unggulan untuk dikembangkan lagi. Terdapat 3 sektor unggulan di Kabupaten Banjar yaitu yang pertama adalah perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Yang kedua adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Dan yang ketiga adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Dan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak pemerintah Kabupaten Banjar dapat melakukan pendataan terhadap badan atau orang yang belum terdaftar dalam wajib pajak dan mendaftarkan menjadi wajib pajak. Selain itu juga perlu dilakukan digitalisasi pembayaran pajak di Kabupaten Banjar agar mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya.

BIBLIOGRAPHY

- Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5(1), 81–94.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Pangalila, M. R. (2014). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP Dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/5880/5413>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, (2019).
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109–124.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).